

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TH. 2008

Assalamu'alaikum wr wb.

Warga Sleman yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana lancar. Selaku Bupati Sleman, saya menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman th.. 2008 sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Th. 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

B. Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (3.185,80 Km²) dan secara administratif terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 86 desa dan 1.212 padukuhan. Sampai akhir th. 2008 jumlah penduduk Kabupaten Sleman sebanyak 1.090.250 jiwa terdiri dari 540.996 laki-laki (49,62%) dan 549.254 perempuan (50,38%), dengan rata-rata kepadatan penduduk 1.898,46 jiwa per km²

Kualitas sumber daya manusia di kabupaten Sleman tercermin dari peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada th. 2008, penghitungan IPM Kabupaten Sleman yang didasarkan pada data th. 2007, diperoleh nilai sebesar 76,7 dengan rincian komponen kesehatan sebesar 81,33, komponen pendidikan sebesar 83,44 serta komponen pendapatan sebesar 64,85. Capaian indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan th. 2006 yang nilainya sebesar 76,2. Nilai IPM Kabupaten Sleman th. 2008 masih menempati peringkat 1 untuk tingkat kabupaten secara nasional, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota menempati peringkat 15 dari 363 kabupaten/Kota se Indonesia meningkat 2 peringkat dibandingkan th. sebelumnya.

Kondisi ekonomi Kabupaten Sleman pada th. 2008 secara makro meningkat. PDRB atas harga berlaku mencapai Rp11,22 trilyun. Angka tersebut meningkat 15,43% dibanding th. 2007 yang pencapaiannya sebesar Rp9,72 trilyun. Kontribusi tertinggi PDRB

diperoleh dari sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa) sebesar 55,28%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; bangunan) memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 27,84% dan sektor primer (pertanian; pertambangan dan penggalian) sebesar 16,86%. Kontribusi sektor tersier dan sekunder dari th. keth. cenderung meningkat, sedangkan kontribusi sektor primen cenderung menurun. Dinamika kondisi perekonomian daerah tersebut telah mewujudkan PDRB perkapita sebesar Rp 10,7 juta. Angka tersebut lebih tinggi 10,3%, dibanding pencapaian th. 2007 sebesar Rp9,7 juta.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah th. 2008 merupakan rangkaian tahapan merealisasikan visi Kabupaten Sleman mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera pada th. 2010. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 14/Per.Bup/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) th. 2005-2010, untuk mewujudkan visi tersebut telah disusun 3 (tiga) misi yaitu menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikan visi tersebut, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan th. 2008 diprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, revitalisasi pertanian dan kehutanan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan keamanan dan ketertiban.

III. URUSAN DESENTRALISASI

A. Urusan Wajib

1. Pendidikan

Peningkatan aksesibilitas pendidikan diindikasikan dengan meningkatnya angka melek huruf, angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar serta menurunnya jumlah anak putus sekolah. Pada th. 2008, angka melek huruf mencapai 93,81% lebih tinggi dibandingkan th. sebelumnya yang capaiannya sebesar 92,17%. Di dalam penyelenggaraan pendidikan formal, angka partisipasi kasar untuk tingkat SD/MI tercapai 115,67%, SMP/MTs tercapai 115,01% dan SMU/SMK/MA tercapai 75,45%. Angka partisipasi murni untuk SD/MI mencapai 98,99%, SMP/MTs mencapai 80,98% dan untuk SMA/SMK/MA mencapai 53,87%. Jumlah anak putus sekolah di semua jenjang pendidikan mengalami penurunan. Jumlah anak putus sekolah untuk tingkat SD/MI sebanyak 37 siswa turun 5%, tingkat SMP/MTs sebanyak 66 siswa turun 52,5%, tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 124 siswa turun 62,4% dari th. 2007.

Upaya pemerataan pendidikan juga diselenggarakan melalui aktivitas pendidikan non formal berupa kelompok belajar paket A fungsional (fokus pada ketrampilan) sebanyak

170 kelompok dengan jumlah warga belajar 1.700 orang, kelompok belajar paket A setara SD sebanyak 5 kelompok dengan warga belajar 100 orang, paket B setara SMP sebanyak 23 kelompok dengan warga belajar 460 orang, dan paket C setara SMA sebanyak 41 kelompok dengan warga belajar 810 orang.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan juga dilakukan dengan peningkatan kapasitas guru. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan hal tersebut adalah; pemberian bea siswa dan subsidi kepada 200 guru untuk menempuh pendidikan di UNY dan Universitas Terbuka, fasilitasi uji sertifikasi guru dari tingkat TK hingga SMA dan SMK sebanyak 1.023 orang, penilaian angka kredit 1.805 guru, pengembangan program bilingual bagi 364 guru, penyusunan model KTSP, pelatihan dan pengembangan KTSP bagi 276 guru, akreditasi 117 sekolah dan pemantapan 150 orang calon asesor serta pemberian insentif GTT/GTY dan PTT 6.797 orang.

Pada th. 2008 secara umum kualitas pendidikan di Sleman meningkat. Angka rata-rata hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) jenjang SD/MI sebesar 7,56 hampir sama dengan rata-rata provinsi yakni 7,57. Untuk jenjang SMP/MTs rata-rata hasil ujian sekolah sebesar 6,77 diatas rata-rata provinsi yakni 6,72. Demikian juga rata-rata hasil ujian jenjang SMA/MA sebesar 7,49, berada di atas rata-rata provinsi, yang nilainya sebesar 7,37 dan untuk jenjang SMK nilai hasil ujian rata-rata 6,91 berada diatas rata-rata provinsi, yang nilainya sebesar 6,86. Peningkatan kualitas pendidikan juga terlihat dengan meningkatnya jumlah sekolah yang perolehan UAN masuk pada peringkat 10 besar tingkat propinsi. Terdapat 3 SMP, 3 SMA jurusan IPA dan 2 SMA jurusan IPS yang masuk peringkat 10 besar. Selama th. 2008 telah diperoleh 26 jenis penghargaan nasional dari jenjang SD, SMP, SMU dan SMK.

2. Kesehatan

Upaya meningkatkan kualitas masyarakat Sleman juga diselenggarakan melalui kebijakan setiap bayi yang lahir harus dalam keadaan sehat dan cerdas secara alami. Implikasinya pelayanan kesehatan harus diberikan sejak bayi dalam kandungan. Kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sleman. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya indikator kesehatan yakni ;rata-rata usia harapan hidup 74,6 th. (laki-laki 72,46 th., perempuan 76,79 th.) di atas rata-rata provinsi 72,4 th. dan nasional 70,6 th.. Di samping itu, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 5,81 dibawah angka provinsi sebesar 19,92 dan angka nasional sebesar 26. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup sebesar 69,31 dibawah angka provinsi sebesar 105 dan angka nasional sebesar 226. Kondisi gizi buruk sebesar 0,54%, dibawah capaian provinsi 2,5% dan angka nasional 5,4%.

Standarisasi pelayanan kesehatan telah dilakukan dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000 dan ISO 9001:2008 pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan 10 UPTD Puskesmas. Selain itu juga telah dilakukan pembangunan dan renovasi 18 bangunan puskesmas yang terstandarisasi. Untuk

pemerataan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit, pada akhir th. 2008 telah diselesaikan pembangunan gedung rumah sakit tipe D di wilayah Prambanan dengan meningkatkan status Puskesmas Prambanan.

Pada th. 2008, kasus demam berdarah turun 17,75% dari 755 kasus pada th. 2007 menjadi 621 kasus, korban yang meninggal juga mengalami penurunan dari 8 kasus pada th. 2007 menjadi 5 kasus. Untuk flu burung terdapat 1 kasus dinyatakan sebagai *suspect*, tetapi dinyatakan negatif oleh RS dr. Sardjito. Untuk *leptospirosis* terdapat 19 kasus dan 3 kasus diantaranya mengakibatkan kematian. Untuk penyakit hepatitis A sampai bulan September 2008 tercatat 783 kasus dan dinyatakan sebagai KLB. Kasus tersebut diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Jumlah kasus hepatitis A dengan kematian nihil sebagian besar terjadi di wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Ngaglik. Dalam penanggulangan KLB tersebut, Dinas Kesehatan melakukan uji petik pemeriksaan kualitas air pada 60 sampel termasuk didalamnya sampel air yang digunakan para penjual makanan. Dari hasil uji petik tersebut, 17,31% memenuhi syarat bakteriologi dan 82,69% tidak memenuhi syarat bakteriologi. Selain itu, dilakukan uji petik pemeriksaan darah pada 68 orang penjaja makanan dan kantin, dengan hasil 3 orang diketahui positif hepatitis A. Untuk mengantisipasi merebaknya kasus tersebut telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 36 th. 2008 tentang *Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan*, yang mewajibkan setiap penjual makanan memiliki sertifikasi sehat untuk produk yang dijualnya.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut telah diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dengan diberikannya Piala Citra Pelayanan Terbaik dari Presiden Republik Indonesia untuk Puskesmas Depok II dan Manggala Karya Bakti Husada Kartika dari Menteri Kesehatan RI pada akhir th. 2008.

3. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sleman sampai th. 2008 termasuk kategori baik. Dari hasil pemeriksaan 26 titik wilayah padat lalu lintas dan fasilitas umum selama 1 jam, kondisi sulfur dioksida (SO₂), karbon monoksida (CO), Nitrogen (NO₂), ozon (HC), dan partikel debu, masih di bawah ambang batas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Th. 1999 maupun Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Th. 2002.

Dalam menjaga kualitas air telah dilakukan pengujian air di 25 titik lokasi di 5 kecamatan (Turi, Pakem, Kalasan, Gamping dan Sleman). Hasil uji menyatakan bahwa parameter kimia semua titik sampel memenuhi persyaratan kualitas air bersih. Untuk melindungi sumber air minum telah dikembangkan sanitasi berbasis masyarakat. pada th. 2008 telah dibangun 5 unit IPAL komunal di Sukunan, Banyuraden, Gamping; 1 unit IPAL komunal di Minomartani, Ngaglik dan 1 unit MCK plus di Jetak II, Sidokarto, Godean; serta 1 unit MCK plus di Blunyahgede, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan tercermin dari

meningkatnya pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat yang pada th. 2008 sebanyak 44 lembaga. Demikian juga peningkatan kesadaran para pengusaha dalam pengelolaan lingkungan. Selama th. 2008 telah dibuat 1.039 dokumen UKL-UPL dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) meningkat 23,68% dibanding th. sebelumnya. Selain itu terdapat 78 unit usaha yang telah mengelola air limbahnya dengan IPAL, dan 150 unit usaha dengan sistem septik.

Upaya meningkatkan kualitas lingkungan juga dilakukan dengan meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH.) di wilayah perkotaan. Berkenaan dengan hal tersebut th. 2008 dibangun beberapa taman kota, diantaranya Taman Denggung dan Taman Pangukan. Pembangunan taman Denggung diupayakan sekaligus memberikan ruang publik yang dilengkapi dengan berbagai permainan anak dan peralatan kebugaran. Keberhasilan di bidang lingkungan hidup yang dicapai adalah perolehan penghargaan juara Nasional nominator madya sekolah berwawasan lingkungan hidup (Adiwiyata) oleh SD Kanisius Kalasan.

4. Pekerjaan Umum

Di dalam peningkatan dinamika ekonomi masyarakat, prasarana jalan merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan berkembangnya distribusi produk dan aksesibilitas masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut telah dilaksanakan peningkatan dan pemeliharaan prasarana, peningkatan jembatan, gorong-gorong dan drainase. Dari kegiatan tersebut, dari jalan kabupaten sepanjang 1.085 km yang terkategori baik sepanjang 314,33 km atau 28,97%, kondisi sedang sepanjang 428,95 km atau 39,53% dan kondisi rusak sepanjang 341,85 km atau 31,5%. Selain itu jembatan yang dikategorikan kondisi baik 38% dari 455 buah.

Di bidang pelayanan irigasi dan menjaga konservasi air tanah telah dilaksanakan pembangunan 2 embung, peningkatan fungsi prasarana pengairan 42 unit bendung dan salurannya, perbaikan 25 buah pintu air, pemeliharaan 2 unit bendung dan saluran di 20 lokasi, pembersihan saluran sepanjang 100 km (setara dengan 100 Daerah Irigasi) serta pengurusan 8 bendung, rehabilitasi gedung pengamat sebanyak 4 unit. Pengelolaan berbagai sarana prasarana pengairan telah melibatkan masyarakat secara langsung. Di Sleman terdapat 442 kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang salah satunya berhasil memperoleh penghargaan di tingkat nasional atas keberhasilannya dalam mengelola air yaitu P3A Tirto Mulyo dari Kecamatan Turi. Prasarana dan sarana pengairan tersebut mampu menjadi sumber pengairan lahan pertanian seluas 24.019 hektar.

5. Penataan Ruang

Sebagai wilayah yang berkembang cukup pesat, sementara luas wilayah terbatas Pemerintah kabupaten berupaya untuk mengintensifkan penataan ruang wilayah. Sampai th. 2008, telah dilaksanakan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang yang mencakup kurang lebih 16,17% dan Rencana Detail Tata Ruang yang mencakup

kurang lebih 54,65% dari luas wilayah kabupaten Sleman. Sementara pada th. 2008 telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pusat Kota Prambanan, perencanaan kawasan perkantoran Kabupaten Sleman, kawasan wisata Kaliadem dan petualangan Gunung Bangkel Berbah, serta pengembangan asrama mahasiswa dan fasilitas pendukungnya.

6. Perencanaan Pembangunan

Aktivitas perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman th. 2008 dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. Proses perencanaan dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, hingga tingkat nasional. Musrenbang tersebut menghasilkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten. Usulan program dan kegiatan tersebut dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

7. Perumahan

Dalam mempertahankan kondisi lingkungan hidup yang seimbang dan mengatasi tingginya perubahan lahan, dan memfasilitasi kemudahan keluarga muda dalam mendapatkan tempat tinggal telah dikembangkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pada th. 2008 telah dibangun 1 *Twin block* Rusunawa berkapasitas 96 kamar. di Gemawang, Sinduadi, Mlati. Selain itu telah disusun dokumen UKL-UPL Rusunawa tahap III di Caturtunggal, Depok seluas 2 hektar dan pengolahan lahan 5.000 meter². Sementara untuk pelayanan penyediaan sarana air bersih, telah dibangun jaringan air bersih sepanjang 6.000 meter di 11 lokasi, pembangunan sanitasi, pembuatan DED air limbah, rehabilitasi jaringan pipa transmisi, pembangunan dan rehabilitasi konstruksi jaringan air bersih sepanjang 10.000 meter di 15 lokasi dan jaringan drainase sepanjang 1.186 meter di 5 lokasi.

8. Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan kepemudaan dan olahraga diupayakan untuk membangun karakter dan kehidupan ber-bangsa serta sekaligus untuk mengantisipasi merebaknya pemakaian napza di kalangan pemuda. Upaya membangun karakter pemuda dilaksanakan melalui pemilihan Paskibraka tingkat wilayah 450 orang, tingkat kabupaten 200 orang, dan pelatihan Paskibraka tingkat kabupaten 38 orang, sosialisasi pertukaran pemuda antar propinsi 70 orang, pemilihan dan pengiriman pemuda tingkat provinsi 30 orang, pengiriman dan pertukaran pemuda antar propinsi (PPAP) 4 pemuda, lomba baris berbaris yang diikuti 81 peleton inti (TONTI) dan lomba tata upacara bendera (TUB) yang diikuti 37 sekolah. Sementara untuk menumbuhkan kehidupan berbangsa, telah dilaksanakan kemah bakti penggalang 59 regu dan pembinaan pembina pramuka 60 orang, Pembinaan budi pekerti dan wawasan kebangsaan pemuda 850 orang dan

Pembinaan organisasi dan pelatihan kepemimpinan pemuda 60 orang. Dalam membentuk jiwa sportifitas dan meningkatkan kualitas olahraga antara lain dilakukan melalui pembinaan klub olahraga pelajar kecamatan cabang sepakbola di 6 kecamatan, bola voli 6 kecamatan, dan tenis meja di 5 kecamatan, Pelatihan terhadap 60 pelatih bulu tangkis dan 60 wasit tenis meja, dan Pelatihan terhadap 100 instruktur senam untuk guru olahraga SMP/MTs/SMA/SMK/MA serta memfasilitasi penyelenggaraan lomba di semua cabang olah raga.

9. Penanaman Modal

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, telah dibuka kesempatan dan peluang terhadap aktivitas investasi dan penanaman modal asing maupun dalam negeri. Pada th. 2008 setidaknya terdapat 6 calon investor fasilitas yang telah mendapatkan surat persetujuan penanaman modal (SPPM) di Sleman. Dinamika investasi yang tumbuh cukup tinggi selama th. 2008 adalah investasi non fasilitas. Investasi yang tidak menggunakan fasilitas keringanan pajak untuk bahan baku. Jumlah unit usaha investasi non fasilitas th. 2008 sebanyak 27.783 unit usaha meningkat 7,13%. Peningkatan ini cukup tinggi dibandingkan dengan th. sebelumnya yang hanya sebesar 4,39%. Peningkatan unit usaha tersebut diikuti pula dengan peningkatan nilai investasi sebesar 9%, sehingga mencapai Rp1,86 trilyun. Investasi non fasilitas telah menyerap 200.000 lebih tenaga kerja atau meningkat 3,85% dari th. sebelumnya.

10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan, aktivitas koperasi tetap didorong sebagai tiang penyangga perekonomian masyarakat. Pertumbuhan jumlah koperasi meningkat 4,4% dari 561 unit pada th. 2007 menjadi 587 unit pada th. 2008. Jumlah anggotanya meningkat 5.539 orang atau 2,66%, dari 202.620 orang pada th. 2007 menjadi 208.159 orang pada th.. Perkembangan volume usahanya meningkat 16,99% dari Rp656,43 milyar pada th. 2007 menjadi Rp768 milyar pada 2008. Dilihat dari dinamika aktivitasnya terdapat 290 unit atau 49,4% yang aktif, 206 unit atau 35,09% pasif dan 91 unit atau 15,50% dikategorikan beku. Jumlah koperasi aktif meningkat 15,5%, jumlah koperasi pasif turun 8,25% dan jumlah koperasi beku menurun 2,19%.

11. Kependudukan dan Catatan Sipil

Di dalam meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan , telah dilaksanakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Pada th. 2008 telah dilaksanakan penerbitan kartu keluarga sebanyak 137.896 kartu, meningkat 15,29%, KTP sebanyak 243.766 buah meningkat 12,69% dibanding th. sebelumnya. Sementara didalam melaksanakan pelayanan akta catatan sipil diantaranya telah menerbitkan akta kelahiran sebanyak 18.623 lembar, akta perkawinan 576 lembar, akta perceraian 65 lembar, akta kematian 1384 lembar dan legalisasi akta catatan sipil sebanyak 27.766 lembar.

Untuk memperlancar dan mengakuratkan pengadministrasian kependudukan telah dilaksanakan perbaikan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan pemutakhiran data kependudukan. Sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang sudah didasarkan pada peraturan daerah telah memperoleh apresiasi oleh Pemerintah Pusat pada th. 2008, dengan diperoleh penghargaan dari presiden.

12. Ketenagakerjaan

Pada th. 2008 aktivitas perekonomian di Sleman telah menyerap tenaga kerja sebanyak 89,52% tenaga kerja dari total angkatan kerja sebanyak 425.338 orang. Kondisi tersebut menurunkan jumlah pengangguran 4,06%. Pada th. 2007 jumlah orang yang tidak bekerja (penganggur) sebanyak 46.448 orang atau 12,38% dari total angkatan kerja, sedangkan pada th. 2008 jumlah pengangguran sebanyak 44.558 orang atau 11,70 % dari total angkatan kerja.

Balai Latihan Kerja telah melaksanakan pelatihan kerja institusiional maupun non institusional kejuruan kepada 620 orang, yang 30 orang diantaranya adalah penyandang cacat. Untuk mengatasi terbatasnya daya tampung BLK, telah dilaksanakan kerjasama pelatihan perbengkelan sepeda motor dengan PT. Astra Honda Motor untuk 55 orang dan bagi peserta yang lulus pelatihan disediakan bantuan penguatan modal maksimal Rp10 juta per orang. Selain itu juga memberikan pelatihan ketrampilan dan penguatan modal Rp. 500 juta pada pekerja terPHK. Perluasan kesempatan kerja juga dilaksanakan melalui pelayanan penempatan tenaga kerja program Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) kepada 900 orang tenaga kerja, serta pengawasan penyaluran AKA/AKAD pada 87 perusahaan dan disalurkan pinjaman dana kepada 150 Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Pengiriman tenaga kerja ke luar daerah dan luar negeri hanya dilakukan untuk tenaga kerja terampil yang memiliki keahlian bukan pembantu rumah tangga.

Untuk mengatasi dampak krisis keuangan global telah dikembangkan kegiatan padat karya di 86 desa yang masing-masing desa memperoleh Rp 17 juta. Dana padat karya tersebut diperuntukan membangun sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan desa. Kegiatan ini dilaksanakan sekaligus untuk mendidik masyarakat untuk selalu bekerja dan menumbuhkan rasa "*handarbeni*" terhadap sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungannya.

Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja telah diselenggarakan pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja, dengan melakukan pengawasan perusahaan dalam melaksanakan norma kerja dan K3, pembayaran premi Jamsostek bagi tenaga kerja kontrak dan honorer 606 orang, mediasi penyelesaian kasus PHI/PHK sebanyak 30 kasus, sosialisasi perlindungan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) ke luar negeri dan pembinaan perlindungan CTKI ke luar negeri 100 orang serta sosialisasi pelaksanaan UMP dan TH.R pada 25 perusahaan dan 50 wakil pekerja.

13. Ketahanan Pangan

Untuk memantapkan ketahanan pangan, Pemkab Sleman telah melaksanakan revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan secara terintegrasi dengan instansi yang lain dan masyarakat. Peningkatan ketahanan pangan tidak sekadar dengan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan, tetapi lebih pada meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan, kemampuan mengolah produk-produk pertanian dan meningkatkan keamanan pangan. Bahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, Pemkab Sleman bekerjasama dengan PKK senantiasa melakukan sosialisasi sejak dini pada anak-anak sekolah dan keluarga untuk memanfaatkan pangan lokal dan tidak menggunakan zat-zat yang berbahaya dalam mengolah makanan. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan mampu menghadirkan prestasi di tingkat nasional dalam bidang ketahanan pangan untuk 8 jenis aktivitas.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak diselenggarakan secara parsial tetapi terintegrasi dengan seluruh aktivitas pembangunan. Artinya semua aktivitas yang diselenggarakan senantiasa berorientasi untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan perempuan. Berkenaan dengan hal tersebut melalui gerakan PKK telah dilakukan pendampingan di 900 padukuhan, 82 desa dan 17 kecamatan serta pemberian bantuan bagi warga binaan (peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera) di 6 desa 240 warga binaan, pembinaan TPA, kebersihan lingkungan, BKB, UP2K, dan evaluasi P2WKSS. Sedangkan Di dalam melakukan pemberdayaan perempuan, Pemkab Sleman telah memperoleh penghargaan dari Presiden .

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera, lebih ditekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting pemberdayaan keluarga untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB, dapat dilihat dari jumlah peserta KB aktif mencapai 117.882 orang dengan peserta KB baru sebanyak 10.644 orang atau meningkat 1,42%. Dibandingkan dengan jumlah PUS sebanyak 147.379 pasangan, maka tingkat prevalensi peserta KB aktif mencapai 79,99%, naik 0,29% dari th. 2007. Sementara keikutsertaan pria dalam KB sebanyak 8.087 peserta atau 6,86% dari peserta KB aktif.

16. Perhubungan

Dalam upaya memperbaiki fasilitas lalu lintas telah dilakukan pembangunan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, cermin cekung di tikungan, dan pemberi

isyarat lalu lintas. Upaya tersebut mampu meningkatkan jumlah rambu-rambu lalu lintas sebesar 12,87%, menjadi 877 buah dan meningkatkan persentase rambu-rambu lalu lintas dalam kondisi baik dari 57% menjadi 65%. Sementara untuk penyediaan fasilitas penerangan jalan umum telah dilakukan pemeliharaan rutin LPJU di 1.500 titik, survey rutin di 17 kecamatan dan pemasangan LPJU baru serta pemasangan kWh meter. Secara umum, upaya tersebut meningkatkan LPJU dari 8.930 titik menjadi 9.141 titik dengan kondisi baik 88% dan jumlah kWh meter yang terpasang meningkat dari 44 kelompok pada th. 2007 menjadi 65 kelompok pada th. 2008. Dalam memberikan perlindungan layanan transportasi umum kepada masyarakat, pada th. 2008 telah dilakukan pengujian kendaraan sebanyak 18.051 kendaraan atau meningkat sebesar 4,2% dari th. 2007. Hasil uji kendaraan tersebut menyatakan 89% kendaraan layak jalan dan 11% tidak layak jalan.

17. Komunikasi dan Informatika

Di dalam memperlancar arus komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam mengakses aspirasi masyarakat telah dikelola layanan sms. Sementara untuk memadukan penyelenggaraan pemerintahan telah dikembangkan aplikasi sistem informasi yang terpadu dan terintegrasi. Sampai th. 2008 telah dikembangkan 16 Sistem Informasi dan Manajemen. Sementara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan telekomunikasi dan informasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah digunakan sistem PABX yang dapat dikembangkan menjadi 500 ekstensi. Saat ini jumlah ekstensi yang terpasang sebanyak 274 ekstensi yang tersambung ke seluruh instansi dan 17 kecamatan.

18. Pertanahan

Pengelolaan urusan pertanahan lebih ditekankan pada penegndalian pemanfaatan tanah melalui perizinan dan penataan Pada th. 2008 telah diproses izin peruntukan penggunaan tanah sebanyak 864 buah, 394 buah disetujui atau 45,60%, 195 buah ditolak atau 22,57% dan 275 buah masih dalam proses atau 31,83%.

Untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan telah diupayakan adanya kepastian status tanah melalui pendataan, pengukuran, dan pensertifikatan tanah kas desa. Sampai th. 2008 jumlah tanah kas desa yang telah bersertifikat sebanyak 5.541 sertifikat dari 17.031 bidang atau meningkat 8,10% dari th. 2007. Selain itu telah diterbitkan rekomendasi 39 rekomendasi izin pakai (*kekancingan*) tanah-tanah *Sultan Ground* dan pemberian rekomendasi permohonan izin Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan, telah disusun Sistem Layanan Informasi Mandiri untuk kecamatan Depok yang berisi tapak bangunan, tata ruang, penggunaan lahan, dan mekanisme prosedur perizinan. Dalam pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah telah diselesaikan 3 permasalahan pertanahan serta penertiban pemanfaatan tanah di 83 lokasi dan pelaksanaan evaluasi di 72 titik lokasi.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Upaya menciptakan keamanan dan ketertiban juga dilaksanakan dengan meningkatkan kerukunan kehidupan beragama dan pengembangan budaya yang ada di masyarakat. Untuk itu keharmonisan hubungan antar umat beragama maupun antara umat beragama terus dibina dan ditingkatkan. Salah satu wadah bagi penciptaan keharmonisan kehidupan beragama dilakukan melalui penyelenggaraan forum komunikasi umat beragama.

Berkaitan dengan pembinaan generasi muda, kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberdayaan karang taruna, pekerja sosial masyarakat, dan koordinator kegiatan kesejahteraan sosial. Khusus untuk pemuda dari kalangan mahasiswa telah dilakukan jalinan komunikasi dialog langsung dalam berbagai kesempatan. Selain itu telah dilakukan pula peningkatan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan serta pementapan ideologi bagi aparat dan tokoh masyarakat.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pengawasan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan senantiasa didasarkan pada regulasi yang berkekuatan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut telah diterbitkan produk-produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah sebanyak 15 raperda, penyusunan 336 buah keputusan Bupati dan 45 buah Peraturan Bupati serta 26 buah perjanjian kerjasama.

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, telah dilakukan evaluasi pelayanan kepada masyarakat dengan survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada 3 instansi yaitu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan nilai indeks 74,87 (kategori baik), Dinas P2KPM nilai indeks 74,60 (kategori baik), serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah nilai indeks 76,87 (kategori baik).

Pengawasan internal diselenggarakan secara terus menerus yang meliputi pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus serta pengawasan melekat. Jumlah temuan pada th. 2008 mengalami penurunan sebesar 3,15% dibandingkan dengan th. 2007 yaitu dari 127 temuan menjadi 111 temuan. Selama th. anggaran 2008 dapat diselamatkan keuangan negara/daerah sebesar Rp788 juta lebih. Terhadap 62 laporan pengaduan yang berasal dari masyarakat, telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil 39 kasus terbukti kebenarannya, 23 kasus tidak terbukti. Dari kasus yang terbukti kebenarannya telah direkomendasikan untuk diberikan sanksi hukuman berat 22 orang, sedang 6 orang dan ringan 5 orang.

Untuk menjaga keberlangsungan dan regenerasi birokrasi telah dilaksanakan pengadaan CPNS dengan jumlah pelamar sebanyak 7.793 orang untuk mengisi formasi pelamar umum sebanyak 331 formasi. Pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan pendidikan dan pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan kepada 568 PNS dan jalur pendidikan formal dengan pengiriman 15 orang tugas

belajar dan pemberian surat izin belajar kepada 869 orang PNS. Peningkatan kompetensi pegawai juga dilakukan dengan sistem pemberian *reward* dan *punishment*. Penghargaan yang diberikan antara lain berupa pemberian Satyalencana Karya Satya kepada 743 pegawai dan penghargaan bagi pegawai purna tugas sebanyak 596 orang. Penerapan hukuman disiplin diberikan kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada th. 2008, hukuman diberikan kepada 5 orang dengan kategori hukuman disiplin berat, 4 orang hukuman disiplin sedang dan 1 orang hukuman disiplin ringan.

Peningkatan dinamika kegiatan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari tingkat kemampuan keuangan daerah. Upaya meningkatkan pendapatan daerah ditempuh intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber - sumber penerimaan lainnya yang sah, peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemanfaatan aset – aset daerah yang potensial. Realisasi pendapatan daerah 108,04% dari target atau Rp 958,68 milyar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai sebesar Rp152,83 milyar atau 143,16% dari target. Dana Perimbangan sebesar Rp 688,94 milyar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp125,81 milyar.

Realisasi Belanja daerah mencapai Rp916,35 milyar atau sebesar 87,20% dari rencana APBD th. 2008 sebesar Rp 1,05 trilyun. Dari sisi pembiayaan penerimaan dapat direalisasikan sebesar Rp 196,05 milyar atau 100,15% dari rencana sebesar Rp 195,76 milyar. Rencana pembiayaan pengeluaran sebesar Rp 29,23 milyar dapat direalisasikan Rp 22 milyar atau 75,29%. Berkat komitmen yang tinggi segenap SKPD, APBD th. 2008 yang menggunakan prinsip *defisit spending* dapat menutup defisit bahkan memiliki SILPA (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran).

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, telah dilaksanakan pelantikan kepala desa sebanyak 16 orang, 28 orang perangkat desa dan 59 orang kepala dusun, termasuk Kepala Desa Sariharjo yang pemilihannya dilaksanakan pada th. 1993.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 th. 2004 dan PP Nomor 72 th. 2005 serta untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa telah diberikan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.9,74 milyar. Upaya lain untuk pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, diberikan dana bagi hasil kepada pemerintah desa yang meliputi Dana Penyeimbang Desa (Pengembalian Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar Rp3,72 milyar, Pengembalian Bea Perolehan dari Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1,65 milyar serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp5,06 milyar. Penggunaan dana bagi hasil tersebut diperuntukan sebagai stimulan pembangunan di tingkat padukuhan disamping untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Fasilitasi yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dan lembaga desa,

Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan bantuan kepada pemerintah desa sebesar Rp17,54 milyar yang meliputi Tunjangan bagi Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, operasional dukuh, bantuan RT/RW, bantuan pemilihan kepala desa, pemilihan dukuh, hadiah lunas PBB, penghargaan kepala desa yang habis masa jabatan, bantuan lumbung pangan dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat untuk kepala desa dan perangkat desa.

Upaya memacu pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Sleman telah mengalokasikan Dana Gotong Royong, bantuan aspal dan TMMD. Dana tersebut diperuntukan menstimulasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, sistem pengelolaan air hujan, tempat ibadah, pengairan dan pasar desa yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. Pada th. 2008 dialokasikan dana sebesar Rp9,80 milyar yang terdiri dari bantuan gotong royong sebesar Rp5,48 milyar, TMMD sebesar Rp120juta dan bantuan aspal sebesar Rp4,20 milyar. Dibandingkan th. sebelumnya alokasi dana tersebut meningkat 99,77%. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 3.159 proposal masyarakat dan mampu menggali partisipasi sebesar 401,38% atau Rp46,15 milyar.

22. Sosial

Pengelolaan urusan sosial lebih ditekankan pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Strategi yang dilaksanakan adalah mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten telah menetapkan 2 kecamatan proyek pencontohan penanggulangan kemiskinan secara terpadu yaitu Kecamatan Prambanan dan Seyegan. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan dengan menggunakan empat pertimbangan yaitu kewilayahan, jumlah KK miskin, PDRB perkapita dan kebijakan khusus yaitu memberikan perhatian pada daerah yang kurang berkembang, wilayah perbatasan, wilayah terkena gempa serta pemerataan pembangunan.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memperbaiki kondisi sosial budaya antara lain diwujudkan dalam fasilitasi pembuatan kartu keluarga untuk 8.995 KK miskin, pemberian bantuan semen untuk memugar rumah sebanyak 14.328 zak. Pemberian beasiswa untuk 4.978 siswa SD, 2.794 SMP dan 1.386 siswa SMA dan SMK, serta bantuan seragam sekolah untuk 7.249 siswa. Di bidang kesehatan selain pelayanan kesehatan langsung, telah didistribusikan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk 18.335 balita, 3.323 ibu hamil dan ibu nifas, pembinaan dan pemberian asuhan keperawatan keluarga rawan kesehatan sebanyak 1.230 orang di 86 desa, pengadaan dan penyaluran serta pemantauan pemberian susu bagi siswa SD/MI rawan gizi untuk 9.800 siswa, pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada 983 anak panti, serta pemberian stimulan untuk pelayanan kesehatan dan pelaksanaan PHBS bagi 4.532 gakin.

Penanggulangan kemiskinan juga dilakukan dengan pemberdayaan penyandang cacat

dari keluarga miskin melalui aktivitas pembinaan sosial dan keterampilan bagi 25 orang penyandang cacat, pemberian stimulan penyandang cacat melalui SLB untuk 25 orang serta rehabilitasi medik untuk 20 penderita kecacatan serta pemberian bantuan kepada 4 organisasi sosial penyandang cacat. Berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu telah mengurangi jumlah keluarga miskin sebesar 3,12%, dari 58.701 KK pada th. 2007 menjadi 56.867 KK pada th. 2008 .

23. Kebudayaan

Pengelolaan urusan budaya diorientasikan untuk menumbuh kembangkan budaya-budaya local. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman selalu mengupayakan pelestarian dan pembinaan seni dan budaya yang jumlah dan jenisnya sangat beragam. Pelestarian kesenian di masyarakat melalui revitalisasi kesenian kerakyatan/religius, apresiasi kesenian reog, penyusunan buku standarisasi pola gerak jenis kesenian dan pemeliharaan barang-barang kesenian (alat musik/gamelan, wayang dan kostum seni). Kekayaan budaya berupa benda cagar budaya selalu dilestarikan. Demikian juga dengan upacara adat yang ada di masyarakat, secara rutin dilakukan pembinaan nilai-nilai dalam upacaranya maupun pengembangan upacara adat menjadi salah satu daya tarik wisata.

Aktivitas seni budaya masyarakat Sleman mampu menghadirkan prestasi nasional Penyaji Arak-arakan dan penyaji unggulan terbaik tingkat nasional dalam Karnaval Prajurit Tradisional "Wira Budaya" 2008 atas nama Bregodo Dowangan (Bremorogeni) Banyuraden, Gamping. Selain itu peringkat V besar Penyaji dan Penata Iringan Terbaik Festival Wayang Tingkat Nasional atas nama Ki Hadi Sutikno dan Utoro Wijayanto, beralamat Tegalsari, Sariharjo, Ngaglik.

24. Statistik

Upaya peningkatan ketersediaan dan validasi data dilakukan melalui penyusunan Buku Sleman dalam Angka, Kecamatan dalam Angka, Statistik Ekonomi Makro (Buku PDRB Menurut Penggunaan Buku PDRB Menurut Lapangan Usaha, dan Buku PDRB Kecamatan), Buku Indikator Harga (Buku Inflasi, Buku Indeks Harga Bangunan dan Buku Statistik Industri), statistik input-output, Buku Statistik Sosial berupa Buku Inkesra, Buku Pengeluaran Konsumsi, Buku Penduduk Pertengahan, Buku Indikator Pembangunan Manusia, Buku Indeks Pembangunan Gender, Buku PDP3D Pembangunan Manusia. Selai itu telah disusun pula Buku dan Booklet Informasi Pembangunan Daerah Th. 2008 serta pendataan potensi desa.

25. Kearsipan

Bidang kearsipan diupayakan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan pada SKPD. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pemberian bimbingan teknis kepada pengelola kearsipan, pembinaan kearsipan, pendampingan kearsipan, monitoring sistem kearsipan pola baru dan lomba sistem kearsipan pola baru pada 40 SKPD.

Pengelolaan arsip di seluruh SKPD meningkat dari 60,80% pada th. 2007 menjadi 63,91% pada th. 2008. Selain itu telah berhasil ditata arsip dinamis inaktif yang dikelola oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip sebanyak 4.735 boks.

26. Perpustakaan

Upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat juga dilakukan dengan peningkatan literasi masyarakat melalui aktivasi dan intensifikasi kegiatan perpustakaan daerah. Pada th. 2008 koleksi buku di perpustakaan daerah berjumlah 42.721 atau meningkat 18,9% dari th. 2007 dengan jumlah pengunjung 150-200 orang per hari. Untuk pemerataan pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat dilakukan pengembangan kantong-kantong layanan di sekolah dan padukuhan serta pelayanan 3 mobil perpustakaan keliling dengan jumlah pengguna 200-300 orang per hari. Jumlah perpustakaan yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mencapai 121 unit. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan perpustakaan telah membuahkan hasil penghargaan berupa Juara I *Jambore Reading Club* Tingkat Provinsi oleh Perpustakaan Tunas Bangsa Dusun Gabugan, Desa Donokerto Kecamatan Turi dan Juara III Perpustakaan Teladan Tingkat Provinsi DIY oleh Perpustakaan Mandiri Desa Banyuraden Kecamatan Gamping.

B. Urusan Pilihan

1. Perikanan

Upaya mewujudkan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pengembangan perikanan. Budidaya perikanan yang dikembangkan oleh masyarakat, selain sebagai sumber perekonomian keluarga juga untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Luas kolam meningkat dari 566,75 hektar menjadi 573,75 hektar. Jumlah kelompok pembudidaya meningkat 4,63% menjadi 315 kelompok. Produksi ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan mencapai 10.297 ton, 9,27 juta ekor dan 704,54 juta ekor. Tingkat konsumsi ikan masyarakat sebesar 24,80 kg/kapita pada th. 2008, meningkat 7,17% dari 23,14 kg/kapita pada th. 2007 (tingkat konsumsi ikan di DIY sebesar 17,02 kg/kapita/th.). Masyarakat Sleman juga berhasil merekayasa indukan lele yang diberi nama Sangkuriang.

2. Pertanian

Pada th. 2008 produksi dan produktivitas hampir semua komoditas pertanian tanaman pangan meningkat dibandingkan th. 2007. Produksi padi mencapai 268.928 ton (meningkat 10,73%), dengan produktivitas mencapai 8,7 ton/ha atau meningkat 8,7%, padi ladang mencapai 3 ton/ha atau meningkat 32,09%. Dengan produksi tersebut menjadikan Sleman surplus beras 96.571 ton. Produksi jagung meningkat 16,02% menjadi 30.896 ton dengan produktivitas sebesar 8 ton /ha meningkat 36,03%. Produksi kedelai mencapai 1.130 ton meningkat 60,28% dengan produktivitas sebesar 1,8 ton/ha meningkat 17,99%. Produksi pisang meningkat 2,51%, produksi Cabe

meningkat 0,35% dan produksi kacang panjang meningkat 40,74%.

Dalam meningkatkan kualitas produk dan baku mutu tanaman pangan, telah diterapkan *Standard Operating Procedure Good Agriculture Practices (SOP-GAP)* untuk komoditas Salak Pondoh. Penerapan sistem budidaya tersebut mampu menghasilkan Salak Pondoh secara rutin dan menjamin higienitas produk. Jumlah rumpun produktif Salak Pondoh mencapai 4.565.793 rumpun pada lahan seluas 2.000 hektar dengan produktivitas 12,8 kg/rumpun. Hasil produksi Salak Pondoh mencapai 58.176,8 ton. Produk Salak Pondoh yang tersertifikasi telah diekspor ke Cina.

Pengembangan peternakan dilakukan meningkatkan budidaya ternak oleh masyarakat. Populasi ternak di Sleman meningkat kecuali untuk jenis sapi perah yang populasinya turun 2,22% menjadi 5.465 ekor dan kerbau turun 2,50% menjadi 3.387 ekor. Peningkatan populasi terjadi pada ayam petelur meningkat 22,36% menjadi sebanyak 1,88 juta ekor, Populasi domba meningkat 20,98% menjadi sebanyak 68.955 ekor dan ayam pedaging meningkat 4,26% menjadi sebanyak 2,79 juta. Untuk memfasilitasi para peternak melakukan aktifitas jual beli ternak, telah diupayakan optimalisasi pelayanan dan pengelolaan pasar hewan Gamping. Dari hasil pelayanan pasar hewan tersebut pada th. 2008 telah terjadi transaksi sebesar Rp114,69 milyar dengan jumlah ternak yang terjual, sapi sebanyak 17.296 ekor, kerbau 164 ekor, kambing dan domba 746 ekor. Dari kegiatan pasar hewan tersebut dihasilkan pemasukan retribusi sebesar Rp708,56 juta.

Produksi daging yang dihasilkan sebanyak 21.558 ton, kulit domba sebanyak 10.270 lembar, dan kulit kambing 3.017 lembar. Produksi susu menurun sebesar 14,59% dari 6.687 ton menjadi 5.712 ton seiring penurunan populasi sapi perah. Peningkatan populasi ternak telah memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat yang mencapai 17,24 gr/kapita/hari.

Di bidang perkebunan telah dilaksanakan upaya peningkatan hasil perkebunan dan pengelolaan hasil pasca panen. Produksi tembakau *virginia*, *vorstenland* dan tembakau rakyat sebesar 9.185 kuintal, tebu sebanyak 53.907 kuintal, kopi robusta, arabika dan kartika sebanyak 861 kuintal, mendong sebanyak 30.325 kuintal dan nilam sebanyak 60 kuintal. Dalam meningkatkan pengelolaan hasil pasca panen telah diberikan pembinaan pengolahan hasil pasca panen, pembelian sarana percontohan berupa alat penyimpanan kopi sangrai dan etalase produk olahan, pembinaan petik rajang, pelatihan teknis operasional alat pengering tembakau, pembelian *soil moisture* dan pengadaan bangunan pengering tembakau.

Untuk membantu kebutuhan modal usaha di bidang pertanian dan kehutanan, telah dialokasikan dana penguatan modal sebesar Rp5,81 milyar untuk 220 kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura, Rp2,02 milyar untuk 120 kelompok tani perikanan, Rp5,21 milyar untuk 107 kelompok peternak, Rp492 juta untuk 24 kelompok petani perkebunan, dan Rp405 juta untuk 6 kelompok tani kehutanan.

3. Kehutanan

Pengelolaan bidang kehutanan difokuskan untuk meningkatkan perlindungan konservasi, rehabilitasi lingkungan dan sumber daya alam. Berkenaan dengan maksud tersebut telah dilakukan penanaman pohon di lereng selatan Gunung Merapi sebanyak 18.500 batang, pemeliharaan 1 hektar tanaman Gaharu, tanaman perindang jalan baru dan Ruang Terbuka Hijau sebanyak 10.100 batang, pembuatan kebun bibit tanaman hutan, penanaman 1.180 batang Gayam, Kantil, Mahoni di sekitar sumber mata air. Upaya pemulihan dan rehabilitasi sumber daya alam tersebut mampu mengurangi luas areal lahan kritis sebesar 3,11%. Hasil produksi kehutanan non kayu berupa madu sebanyak 2.775 kg dan kokon ulat sutera mencapai 300 kg.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi tenaga surya dikembangkan untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat yang tidak terjangkau layanan listrik PLN. Pada th. 2008 telah terpasang 14 unit PLTS di wilayah Kecamatan Prambanan, sehingga selama empat th. terakhir telah terpasang 127 unit namun pada saat ini masih terdapat 42 KK yang belum menggunakan listrik. Selain itu, dilaksanakan pula pembangunan jaringan 1 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kecamatan Turi dan 2 unit di Kecamatan Minggir. Pengembangan energi alternatif juga dilakukan dengan memanfaatkan potensi energi biogas baik dengan memanfaatkan kotoran sapi maupun MCK komunal.

5. Pariwisata

Promosi wisata tidak lagi diorientasikan pada aktivitas pameran produk wisata, tetapi lebih disinergiskan sebagai bagian dari promosi produk kerajinan. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain penataan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kaliurang, Trumon dan Agrowisata, penyusunan rencana induk pengembangan obyek wisata Candi Ijo, penyelenggaraan Gebyar ODTW, dan pembenahan dan pembinaan kelompok sadar wisata, kelompok usaha wisata dan kelompok wisata remaja.

Pada th. 2008 aktivitas wisata semakin bergairah yang tercermin dari meningkatnya jumlah wisatawan sebesar 29,45% menjadi 2.276.478 orang serta rata-rata lama tinggal wisatawan meningkat dari 1,36 hari menjadi 2,84 untuk wisatawan nusantara dan dari 1,28 hari menjadi 2,62 hari untuk wisatawan mancanegara.

6. Industri

Pengembangan perekonomian daerah lebih diorientasikan pada pemberdayaan potensi lokal dengan tenaga kerja lokal pula. Aktivitas industri skala kecil menengah masih mendominasi aktivitas perekonomian masyarakat. Industri kecil dan rumah tangga telah memberikan kontribusi pertumbuhan bidang industri sebesar 99,5%, sedangkan kontribusi industri menengah dan besar hanya 0,5%. Jumlah industri kecil dan rumah tangga sebanyak 14.610 unit usaha atau meningkat 0,38% dibanding th. sebelumnya sebanyak 14.555 unit usaha. Untuk meningkatkan kapasitas para pelaku industri telah

dilakukan berbagai kegiatan antara lain ketrampilan dan teknologi bagi wirausaha baru, pelatihan teknologi pembuatan kompor gas, manajemen usaha industri kecil, dan pelatihan *total motivation training* bagi pengusaha IKM.

7. Perdagangan

Pembangunan sektor perdagangan difokuskan pada perlindungan konsumen dan fasilitasi peningkatan ekspor yang dilaksanakan melalui pengamanan produk produk melalui monitoring harga bahan pokok 20 komoditas, monitoring distribusi barang dalam pengawasan, pembinaan perlindungan konsumen dan pemantauan barang kedaluwarsa.

Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi dengan Bulog dan lembaga terkait. Perdagangan luar negeri pada th. 2008 mengalami penurunan. Beberapa transaksi batal sebagai imbas dari krisis finansial global. Nilai ekspor menurun sebesar 1,10% dari sekitar US\$55 juta menjadi sekitar US\$54 juta. Komoditas yang diekspor mencakup 41 jenis dengan 57 negara tujuan antara lain Amerika, Jepang, Philipina dan Inggris. Komoditas ekspor yang terbesar meliputi pakaian jadi (*garment*), sarung tangan kulit, mebel kayu, lampu pijar, tekstil, kerajinan kulit, kerajinan batu, kerajinan kayu, dan papan kemas. Jumlah usaha perdagangan di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan 8,94% dari 8.766 unit menjadi 9.550 unit yang meliputi PT, CV, Firma, perorangan, koperasi dan badan usaha lainnya. Untuk meningkatkan dinamika perdagangan telah dilakukan perlindungan keberadaan pasar tradisional sebagai tempat transaksi masyarakat.

8. Ketransmigrasian

Pada th. 2008, penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Forum Mitra Makarya Muktitama di 3 Kabupaten (Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu), uluhan ketransmigrasian bagi 700 orang, bimbingan pendaftaran transmigrasi kepada 125 KK dan pemantau transmigrasi kembali, seleksi dan validasi data calon transmigrasi sebanyak 440 KK, monitoring dan evaluasi penempatan transmigrasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur serta p dan motivasi bagi calon transmigrasi sebanyak 60 KK.

IV. TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

Tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman adalah :

1. Bidang TPH untuk membantu upaya pengembangan agribisnis, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dengan anggaran sebesar Rp3.097.978.627,00 realisasi Rp3.053.228.620,00 atau 98,55. Realisasi pelaksanaan tugas antara lain penyaluran dana bantuan untuk Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RPPPO) dan *System Rice of Intensification* (SRI), pengadaan alat

- pertanian bagi kelembagaan *on farm* atau pasca panen salak pondoh, krisan, kentang dataran medium, bantuan benih padi 440 ke kelompok tani 275.000 kg, jagung 25 kelompok tani 5.625 kg, pengembangan perbenihan padi seluas 25 ha, reklamasi lahan sawah seluas 15 ha, rehabilitasi JITUT seluas 400 ha, rehabilitasi JIDES seluas 100 ha dan pembuatan sumur resapan 6 unit.
2. Bidang Peternakan untuk membantu upaya pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan dengan anggaran sebesar **Rp839.438.000,00 realisasi Rp776.873.616,00 atau 92,54%**. Realisasi pelaksanaan tugas antara lain pelayanan agroindustri pedesaan berbasis peternakan, pengadaan bangunan pengolahan biogas limbah ternak, pengadaan alat pengolah susu & *cooling unit*, pelaksanaan Biogas asal ternak bersama masyarakat (Batamas) sapi potong di kelompok tani "Surodadi" Jagalan Margodadi Seyegan, pengembangan ternak itik di kelompok "Mapan" Jogorejo Sendangsari Minggir, pengembangan ternak kambing PE di kelompok "Marsudiluhur" Pirak Mertosutan Sidoluhur Godean dan pengembangan ternak kelinci di kelompok ternak kelinci Desa Margorejo Tempel dan pengadaan peralatan penanganan produk susu dan pembangunan tempat pengumpulan unggas di Kowanan Sidoagung Godean.
 3. Bidang Kehutanan untuk membantu pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) berupa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan anggaran Rp709.905.000,00, realisasi Rp506.719.000,00 atau 71,38%. Realisasi pelaksanaan tugas antara lain pemeliharaan tanaman hutan rakyat seluas 490 ha dan *block grant* 375 ha, penyelenggaraan kegiatan kepeloporan TNI dalam Gerakan Penanaman Swadaya (Gerhan), fasilitasi acara Hari Menanam di Embung Karanggeneng Purwobinangun Pakem.
 4. Bidang Kesehatan untuk membantu Program Upaya Kesehatan Perorangan berupa kegiatan pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan dengan anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00, realisasi Rp2.057.380.450,00 atau 82,30%. Realisasi pelaksanaan tugas antara lain palat kedokteran instalasi bedah sentral, instalasi ICU, instalasi kandungan & kebidanan dan instalasi rawat inap.
 5. Bidang Ketenagakerjaan untuk membantu upaya Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja, serta Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp1.565.982.000,00 realisasi Rp1.410.607.000,00 atau 90,07%. Pelaksanaan tugas direalisasikan dalam bentuk kewirausahaan baru, padat karya produktif, penanganan 15 kasus, pembentukan KOMITE AKSI Tingkat Kabupaten dan pemetaan pengawasan status kerawanan ketenagakerjaan, dan ggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi 11 paket, pelatihan teknis 16 paket, pelatihan tenaga kerja siap pakai 9 paket, pelatihan keliling bagi masyarakat pedesaan 7 paket, pelatihan MTU di pedesaan 5 paket.
 6. Bidang Pekerjaan Umum (Pengairan) untuk membantu Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya berupa kegiatan Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif *Water Resources and Irrigation Sector Management Program* (WISMP) serta Pemberdayaan Masyarakat berupa kegiatan

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp1.183.573.000,00 realisasi Rp835.302.754,00 atau 70,57%. Realisasi pelaksanaan tugas antara lain jaringan irigasi di 6 daerah irigasi seluas 1186 ha dan perkuatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP),

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan berupa kegiatan Peningkatan keberdayaan masyarakat serta PNPM perdesaan dan kecamatan dengan anggaran sebesar Rp1.718.720.000,00 realisasi Rp1.718.720.000,00 atau 100%. Realisasi pelaksanaan tugas antara lain pembangunan perbaikan sarana dasar yang memberikan manfaat langsung secara ekonomis kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat, peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal dan penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).
8. Bidang Pemerintahan Umum untuk Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah berupa kegiatan Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi/*Sustainable Capacity Building and Development* (SCBD) dengan anggaran sebesar Rp6.038.923.000,00, realisasi Rp2.363.033.029,00 atau 39,13%. Realisasi pelaksanaan tugas antara lain penyusunan analisis pengembangan wilayah, analisis dampak lingkungan, perencanaan dan manajemen ekonomi daerah, perencanaan peningkatan pendapatan daerah dan penyusunan SIM Perijinan Terpadu meliputi SIM keluhan dan saran serta SIM Perijinan Industri dan Pariwisata.

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

Dalam rangka mempersiapkan desa untuk melaksanakan sebagian urusan yang akan diserahkan, upaya penguatan kelembagaan desa dilaksanakan melalui penetapan beberapa regulasi tentang desa, peningkatan SDM, penguatan keuangan desa, dan penertiban aset desa.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Lingkup kerjasama yang dilakukan adalah mengatasi permasalahan khususnya di daerah perbatasan karena berbagai masalah dan kepentingan sering muncul melewati batas-batas wilayah administratif. Kerjasama dilakukan kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dibidang perindustrian dan perdagangan, pengelolaan sumber daya air, peningkatan kualitas ternak, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan budidaya, penanggulangan bencana alam, perindustrian dan perdagangan. Kerjasama juga dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan program bidang pariwisata, dalam bentuk Forum Java Promo. Kerjasama tersebut beranggotakan 15 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Selain itu untuk mengatasi

permasalahan yang muncul di wilayah aglomerasi perkotaan Kabupaten, telah dilaksanakan kerjasama dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dalam rangka pengembangan kapasitas pemerintahan daerah berkelanjutan yang diformulasikan melalui pendampingan *Sustainable Building For Decentralitation (SCBD)*, kerjasama peningkatan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan irigasi sumber daya air dengan Bank Dunia dan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah yang diformulasikan melalui *Water Resources and Irrigation Sector Project (WISMP)*.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dalam memperlancar jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kondusif, koordinasi dengan instansi vertikal secara insidental selalu dilakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan mendesak. Kerjasama dengan instansi vertikal diformulasikan dalam Forum Kebijakan Pimpinan Daerah (Rakorda yang melibatkan unsur kepala dan wakil kepala dari institusi Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort (Polres), Komando Distrik Militer (Kodim) dan DPRD dan Forum Komunikasi Pengadilan Kehakiman Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkejakpol) yang melibatkan dari unsur Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort. Selain itu koordinasi juga dilaksanakan dengan Kantor Pertanahan, BPS, dan Kantor Departemen Agama.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan dan menghindari permasalahan dan sengketa batas daerah, dilaksanakan kegiatan penanganan wilayah perbatasan melalui penegasan batas daerah di perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul dan diperbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Klaten. Penegasan Batas Daerah dilaksanakan dengan penelitian dokumen batas, pelacakan 28 titik batas antara kabupaten Sleman dengan Kab. Gunungkidul serta pemeliharaan pilar. Selain itu juga dilaksanakan penegasan batas daerah sepanjang ± 35 km dengan pemasangan pilar batas antara kabupaten Sleman Provinsi DIY dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sleman menitikberatkan pada pengurangan resiko bencana sehingga sebagian besar kegiatan berada pada fase pra bencana. Selain itu memadukan mitigasi fisik dan mitigasi non fisik. Antisipasi terjadinya bencana dilakukan melalui: peningkatan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi barak pengungsian, pengadaan perlengkapan barak pengungsian, operasional dan pemeliharaan Bunker dan unit Early Warning System serta rehabilitasi t Bunker dan Pembangunan Pagar Gardu Pandang Kaliadem. Untuk Di daerah yang

rawan kekeringan telah dilakukan pembinaan dan pengelolaan Air baku. Untuk memberikan kesiapan diri bagi masyarakat di daerah rawan bencana dan aparat, secara rutin dilakukan gladi lapang.

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk menjaga stabilitas kemandirian dan ketertiban masyarakat yang kondusif difokuskan pada upaya pencegahan. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mengupayakan penyelesaian konflik di tingkat bawah sehingga tidak menjadi besar. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain monitoring, deteksi dini dan pencegahan melalui forum kewaspadaan dini masyarakat serta mengefektifkan kinerja Badan Komunitas Intelijen Daerah (BAKOMINDA). Untuk memacu ketaatan masyarakat kepada hukum, telah dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan daerah melalui operasi PPNS.

Penanggulangan NAPZA lebih diorientasikan pada upaya antisipatif penyalanggunaan napza. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintensifkan kebersamaan dengan penegak hukum dan organisasi sosial dan kemasyarakatan. Di Sleman telah terbentuk dan operasional 8 desa Perintisan Desa Bebas NAPZA.

VI. PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dicapai ini merupakan kerjasama dan kerjakeras seluruh masyarakat, DPRD, Pemerintah daerah maupun satuan kerja vertikal. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Demi penyempurnaan kegiatan pembangunan di masa mendatang, kami terbuka terhadap kritik dan saran. Kritik dan saran dapat disampaikan melalui email [Pemdasleman @ pembabsleman. go.id](mailto:Pemdasleman@pembabsleman.go.id) dan sms center dengan cara ketik slm saran ke 2740 atau 0811 2500 666. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Sleman, 30 Maret 2009

BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO